



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 274/D/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR  
476/C/2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
BUPATI TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 476/C/2022 sebagaimana telah ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan kebutuhan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 476/C/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 476/C/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

=

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 476/C/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2023 tersebut dalam Lampiran sehingga setelah diubah secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 3 Juli 2023  
Plh. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-da-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 274/D/2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 KULON PROGO NOMOR 476/C/2022  
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN  
 PERATURAN BUPATI TAHUN ANGGARAN  
 2023

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN BUPATI

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS (BARU/ PERUBAHAN)	RENCANA PEMBAHASAN
1	2	3	4	5	6
1.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman	a. pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman; dan b. kewajiban setiap orang menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada pemerintah.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perubahan	TW II
2.	Peubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama	Upaya perbaikan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, non diskriminatif, dan akuntabel	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Baru	TW II

1	2	3	4	5	6
3.	Pemeriksaan Pajak Daerah	Pedoman dalam memeriksa Wajib Pajak Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	TW III
4.	Kelompok Jaga Warga	Kelompok Jaga Warga	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru	TW II
5.	Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo	Tindak lanjut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru	TW II
6.	Pedoman Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo	Pedoman dalam mengelola kepegawaian di Perumda Aneka Usaha Kulon Progo	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Baru	TW II
7.	Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi serta Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo	Pedoman dalam memberikan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas serta pedoman dalam menggunakan laba perusahaan umum daerah Aneka Usaha Kulon Progo	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Baru	TW III
8.	Pedoman Kepegawaian Perusahaan Umum Bank Penkreditan Rakyat Bank Kulon Progo	Pedoman dalam mengelola kepegawaian di Perusahaan Umum Daerah Bank Penkreditan Rakyat Bank Kulon Progo	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Baru	TW II
9.	Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi serta Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Kulon Progo	Pedoman dalam memberikan penghasilan kepada Direksi dan Dewan Pengawas	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Baru	TW II
10.	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo	Teknis pengelolaan cadangan pangan oleh pemerintah kalurahan untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, bermutu, aman, merata dan terjangkau di kalurahan	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Baru	TW I

1	2	3	4	5	6
11.	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Jangkaran	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Jangkaran	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i> )	Baru	TW III
12.	Prosedur Pemberian Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat dan Tempat Ibadah	Prosedur Pemberian Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat dan Tempat Ibadah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baru	TW II
13.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan	Pengelolaan alokasi dana kalurahan pada setiap kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Baru	TW I
14.	Penetapan Batas Desa	Batas Desa Kalurahan Kalidengen, Plumbon, Demen, Karangwuni, dan Sogan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Baru	TW II
15.	Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan	Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Baru	TW II

1	2	3	4	5	6
16.	Pengelolaan Arsip Pemerintahan Kalurahan/Desa Kabupaten Kulon Progo	Tata cara dan mekanisme pengelolaan Arsip Pemerintahan Kalurahan Kabupaten Kulon Progo	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baru	TW I
17.	Pengelolaan Arsip Elektronik Kabupaten Kulon Progo	Pengelolaan Arsip Elektronik Kabupaten Kulon Progo	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baru	TW I
18.	Pengelolaan Arsip Terjaga	Tata cara dan mekanisme pengelolaan Arsip Terjaga	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baru	TW I
19.	Standar Kompetensi Jabatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Standar kompetensi bagi pejabat setara eselon III dan IV yang terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural dan kompetensi teknis	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Baru	TW III
20.	<i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2022-2024	Pedoman Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2022-2024	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Baru	TW IV
21.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Baru	TW IV
22.	Sistem Kerja	Pengaturan sistem kerja pasca Penyederhanaan Birokrasi	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Baru	TW I
23.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I

1	2	3	4	5	6
24.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I
25.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I
26.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I
27.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I

1	2	3	4	5	6
28.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Wates pada Dinas Kesehatan	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I
29.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I
30.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I
31.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I

1	2	3	4	5	6
32.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I
33.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I
34.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I
35.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I

1	2	3	4	5	6
36.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I
37.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I
38.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I
39.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I

1	2	3	4	5	6
40.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I
41.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I
42.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I
43.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I

1	2	3	4	5	6
44.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I
45.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I
46.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I
47.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW I

1	2	3	4	5	6
48.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. petunjuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024</li> <li>b. petunjuk penertiban dan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024</li> </ul>	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru	TW II
49.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati tentang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tata cara dan persyaratan pemberian insentif dan kemudahan penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru	TW II
50.	Perlindungan Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pencegahan pelepasliaran ikan Invasif dan berpotensi invasif di Perairan Umum Kabupaten Kulon Progo;</li> <li>b. larangan menangkap ikan dengan strom, alat dan bahan yang dilarang;</li> <li>c. pemberitahuan terhadap kegiatan yang terkait budidaya perikanan kepada Dinas; dan</li> <li>d. Sanksi bagi mereka pelaku yang menangkap ikan dengan alat/obat berbahaya.</li> </ul>	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo	Baru	TW II
51.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Pendetailan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru	TW IV

1	2	3	4	5	6
52.	Percepatan Penurunan Stunting di Daerah	Percepatan Penurunan Stunting di Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Baru	TW I
53.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa	a. pemanfaatan rumah susun sewa; b. pengelolaan penghunian; c. administrasi sewa; dan d. pemasaran.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru	TW II
54.	Pengelolaan Rumah Khusus	Pengelolaan rumah khusus	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru	TW II
55.	Tarif Pelayanan Air Limbah Domestik	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik khususnya pada tarif dan ketentuan air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru	TW III
56.	Rencana Induk Persampahan	<i>Master plan</i> /Rencana Induk Persampahan Kabupaten Kulon Progo	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru	TW IV
57.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perubahan	TW IV

1	2	3	4	5	6
58.	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru	TW IV
59.	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagai perwujudan pemanfaatan tata ruang; dan b. pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru	TW IV
60.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	Mekanisme bantuan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru	TW IV
61.	Penyediaan Tanah Pemakaman Bagi Pengembang Perumahan	a. ketentuan penyediaan lahan makam bagi pembangunan perumahan; dan b. ketentuan kompensasi bagi pembangunan perumahan yang tidak dapat menyediakan lahan makam	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru	TW IV
62.	Rencana Kawasan Permukiman	Dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan lingkungan hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru	TW IV

1	2	3	4	5	6
63.	Perlindungan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Mekanisme perlindungan Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas	Badan Kepegawaian Perencanaan dan Pengembangan	Baru	TW III
64.	Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2027	Kebijakan dan Strategi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Aksi, Program dan Kegiatan serta indikasi Pendanaan sampai Tahun 2027	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru	TW IV
65.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	TW III
66.	Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Tanda Nomor Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	IBaru	TW II
67.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	Penyesuaian Nomenklatur	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru	TW IV

1	2	3	4	5	6
68.	Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 – 2026	Pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Baru	TW IV
69.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	Pedoman pengawasan intern	Inspektorat Daerah	Baru	TW IV
70.	Tambahkan Penghasilan Pegawai Khusus Inspektorat Daerah	Tambahkan penghasilan pegawai khusus Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Inspektorat Daerah	Baru	TW IV
71.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	Baru	TW IV
72.	Pencabutan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	a.pelaksanaan tugas dan Fungsi yang bersifat teknis operasional yaitu pelayanan pengelolaan jaminan Kesehatan sudah dilaksanakan oleh Lembaga lain yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). b.pelaksanaan pelayanan dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan harus dilaksanakan secara 1 pintu	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW IV

1	2	3	4	5	6
73.	Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>a. penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini dilaksanakan oleh unit non struktural Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dibentuk berdasar Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak)</p> <p>b. untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan</p>	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Baru	TW IV
74.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada PT. Selo Adi Karto	Pedoman pemberian pinjaman daerah berupa pinjaman jangka pendek untuk modal usaha PT. Selo Adi Karto	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	TW II
75.	Tata Cara Penagihan Pajak Daerah	Pedoman penagihan tunggakan pajak daerah kepada wajib pajak	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	TW II
76.	Penyesuaian Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023	Penyesuaian Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun 2023 berupa pengurangan besarnya keringanan PBB P2 tahun 2022 secara proporsional pada ketentuan PBB P2 Tahun 2023 serta memberikan keringanan sebesar 40% untuk objek baru tahun 2023	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	TW I

1	2	3	4	5	6
77.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Perusahaan	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Perusahaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru	TW I
78.	Tata Cara Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Teknis penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara dan Pengadaan ASN	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Baru	TW II
79.	Pengelolaan Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Teknis penyusunan SKP dan penilaian SKP dengan memasukkan <i>core values</i> berAKHLAK	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Baru	TW II
80.	Pengaturan Pengelolaan Sistem Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Teknis pengelolaan SIMASNEG	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Perubahan	TW III
81.	Pengelolaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil	Tata cara pemberian izin melanjutkan pendidikan dengan beasiswa atau biaya mandiri	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Perubahan	TW III
82.	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Teknis pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN Pemkab Kulon Progo	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Perubahan	TW IV

1	2	3	4	5	6
83.	Standardisasi Honorarium Forum Komunikasi Pemimpin Daerah Tahun 2024	Standardisasi Honorarium Forkopimda dan Forkopimkap	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baru	TW IV
84.	Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo 2022-2026	Dokumen Kajian Resiko Bencana memberikan informasi terkait dengan bahaya, Kerentanan, dan kapasitas serta potensi dampak kerugian akibat bencana di Kabupaten Kulon Progo	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru	TW II
85.	Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kulon Progo 2023-2027	Rencana Penanggulangan Bencana merupakan Program Strategis Pemerintah Kabupaten 5 tahunan pada seluruh bidang cakupan penanggulangan bencana baik tahap pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk seluruh ancaman bencana prioritas, didalamnya memuat Rencana Aksi Daerah tentang Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru	TW II
86.	Pendelegasian Kewenangan Pemberian Peringatan Dini Bencana Tsunami di Kabupaten Kulon Progo	Pendelegasian Kewenangan Pemberian Peringatan Dini tsunami dari Bupati Kulon Progo ke Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru	TW II
87.	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2027	Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diperlukan untuk pembagian fungsi koordinasi dan komando dalam penanganan darurat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru	TW IV

1	2	3	4	5	6
88.	Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	<p>Prosedur penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bertujuan untuk:</p> <p>a. mewujudkan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah;</p> <p>b. mewujudkan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintah yang baik dan benar; dan</p> <p>c. mewujudkan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memberikan peluang dan atau kesempatan untuk peran serta masyarakat termasuk dunia usaha.</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru	TW II
89.	Penghasilan dan Tunjangan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan	Penghasilan dan Tunjangan Lurah dan pamong Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perubahan	TW II

1	2	3	4	5	6
90.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan	Mekanisme penyusunan dokumen RPJMKal dan RKPKal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perubahan	TW III
91.	Standar Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan standar akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perubahan	TW I
92.	Pedoman Pelaksanaan Administrasi Desa	Pedoman pelaksanaan administrasi desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perubahan	TW II
93.	Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Pembentukan dan penguatan kampung Pedoman pelaksanaan Keluarga Berencana di Kalurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Baru	TW I
94.	Pemeliharaan Status Bebas Malaria	Strategi mempertahankan Daerah dengan status Bebas Malaria	Dinas Kesehatan	Baru	TW I
95.	Rencana Aksi Daerah Status Bebas Malaria 2022-2026	Rencana Aksi Daerah Status Bebas Malaria 2022-2026	Dinas Kesehatan	Baru	TW II

1	2	3	4	5	6
96.	Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Terpadu Laboratorium Kesehatan Kulon Progo	Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Terpadu Labkes Kulon Progo	Dinas Kesehatan	Baru	TW II
97.	Tarif Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kulon Progo	Tarif Unit Pelaksana Teknis Labkes Kulon Progo	Dinas Kesehatan	Baru	TW II
98.	Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Dinas Kesehatan	Baru	TW II
99.	Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek di Kabupate Kulon Progo	Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Di Kabupaten Kulon Progo	Dinas Perhubungan	Baru	TW II
100.	Tata Tanam Tahunan Periode 2023-2024	Rencana Tata Tanam Tahunan Periode 2023-2024	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru	TW II
101.	Kompensasi Bagi Warga Terdampak Operasional Tempat Pembuangan Akhir	Kompensasi bagi warga sekitar Tempat Pembuangan Akhir terdampak operasional Tempat Pembuangan Akhir	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru	TW II

1	2	3	4	5	6
102.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Persampahan	Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Persampahan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perubahan	TW II
103.	Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sistem Manajemen dan Tata Cara Penerapan Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Baru	TW II
104.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Pedoman Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perubahan	TW I
105.	Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Pedoman Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perubahan	TW III
106.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	TW II

1	2	3	4	5	6
107.	Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pedoman dalam menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta Rekapitulasi Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	TW I
108.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023	Pedoman dalam penyusunan perencanaan penganggaran	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perubahan	TW I
109.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023	Pedoman dalam penyusunan perencanaan penganggaran	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perubahan	TW I
110.	Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024	Standardisasi harga satuan barang dan jasa tahun anggaran 2024	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	TW III
111.	Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	TW II
112.	Pemberian Keringanan Pajak Daerah	Pemberian keringanan pajak <i>office</i> dan <i>self assessment</i> .	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	TW II
113.	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baru	TW II
114.	Pedoman Pengawasan Internal	Penjelasan standar APIP antara lain: a. ruang lingkup ; b. bentuk pengawasan; c. pemantauan; dan d. pemutakhiran	Inspektorat Daerah	Perubahan	TW II

1	2	3	4	5	6
115.	Pedoman Probity Audit	Pedoman pelaksanaan probity audit bagi APIP	Inspektorat Daerah	Baru	TW II
116.	Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan pelayanan adminduk</li> <li>b. pengaturan buku pokok pemakaman</li> <li>c. contrarius Actus</li> <li>d. P4 (Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan)</li> <li>e. legalisasi dokumen kependudukan</li> <li>f. pengaturan Hak Akses Siak</li> <li>g. pemanfaatan Data Kependudukan</li> <li>h. layanan pindah datang online</li> </ul>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baru	TW II
117.	Pengembangan Koleksi Perpustakaan	Pelaksanaan Pengembangan Koleksi Perpustakaan di Kabupaten Kulon Progo	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baru	TW II
118.	Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Klasifikasi arsip, jangka simpan dan hak akses arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baru	TW II
119.	Alih Media Arsip	Ketentuan tentang alih media arsip dan autentikasi arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baru	TW III
120.	Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah	Tata Kelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	TW II

1	2	3	4	5	6
121.	Pemberian Tunjangan Hari Raya	Mekanisme Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	TW II
122.	Pemberian Gaji ke 13	Mekanisme Pemberian Gaji Ketigabelas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru	TW II
123.	Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame	Pengaturan Perhitungan Pajak Reklame	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perubahan	TW III
124.	Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Parkir	Pengaturan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Parkir, disesuaikan dengan aplikasi pajak daerah.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perubahan	TW II
125.	Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Perubahan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024	Pedoman dalam penyusunan perencanaan Penganggaran dengan ketentuan standar harga barang dan jasa mencakup sarana kerja, jasa dan konstruksi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perubahan	TW III

1	2	3	4	5	6
126.	Tata Cara Perforasi	Pedoman yang mengatur tata cara perforasi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perubahan	TW III
127.	Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2023-2026	Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2023-2026	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Baru	TW I
128.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perubahan	TW II
129.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	Perubahan tentang mekanisme pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Perubahan	TW II
130.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah	a. penambahan entitas inisiator inovasi; b. penyesuaian nomenklatur perangkat daerah; dan c. mekanisme reward dan punishment.	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	Perubahan	TW III

1	2	3	4	5	6
131.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi	Perubahan Lembar Penilaian Kinerja Penyedia Jasa pada Lampiran	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	Perubahan	TW II
132.	Penanganan Rumah di Kawasan Bencana	Tata cara/mekanisme Penanganan Rumah di Kawasan Bencana	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru	TW III
133.	Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pelaksanaan Ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Baru	TW II
134.	Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pelaksanaan Ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Baru	TW II
135.	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baru	TW III

1	2	3	4	5	6
136.	Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Pemutakhiran kode Klasifikasi Arsip agar sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baru	TW III
137.	Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Terintegrasi di Kabupaten Kulon Progo	Daftar Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Terintegrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru	TW III

Wates, 3 Juli 2023

Plh. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO